

Nasib Protokol Kyoto Dibahas

Penentuan masa depan Protokol Kyoto dan upaya memacu bantuan bagi kaum miskin di berbagai negara mulai dibahas oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Senin (28/11), di Durban, Afrika Selatan.

Sebanyak 194 negara hadir pada pertemuan Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) selama 12 hari. Pertemuan itu sebenarnya bagian dari sebuah proses hasil kesepakatan pada KTT Rio tahun 1992.

Presiden Afrika Selatan Jacob Zuma dan Presiden Chad Idriss Deby Itno menghadiri upacara pembukaan pembicaraan tersebut, yang kemudian diakhiri dengan pertemuan tingkat tinggi menteri.

Agenda utama pada pertemuan tersebut adalah membahas nasib Protokol Kyoto, sebuah kesepakatan global yang menetapkan target untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, yang sudah ditandatangani beberapa negara dan berakhir pada 2012.

Konferensi ini juga harus mendorong lebih maju "Dana Iklim Hijau" yang akan menyalurkan dana hingga 100 miliar dollar AS per tahun pada tahun 2020 untuk negara-negara yang paling terkena kekeringan, banjir, badai, dan naiknya permukaan laut. Para ilmuwan memperkirakan, kondisi negara-negara itu pada abad ini akan memburuk.

"Dalam dua minggu ini kita harus membuahkan hasil," kata Menteri Luar Negeri Meksiko Patricia Espinosa Castellano, yang memimpin pelaksanaan perundingan serupa tahun lalu di Cancun, Meksiko.

"Ada jutaan orang -sebagian besar di negara-negara miskin dan berkembang- yang bergantung pada keputusan kita," tambahnya. Namun, suasana di pembicaraan memburuk akibat adanya keretakan mengenai cara membagi beban pengurangan emisi dan krisis ekonomi dunia yang terus membayangi upaya mengumpulkan dana iklim itu.

Menurut Yayat, pembentukan zona itu sangat penting karena banyak bangunan penting yang menyangkut kesejahteraan hidup bukan hanya warga DKI Jakarta, tapi juga warga di luar Ibu Kota.

"Keberadaan PLTU dan adanya PLTN di wilayah utara Jakarta harus diantisipasi dari gangguan genangan air atau banjir. Jika ini terganggu, maka akan ada ketidakstabilan masyarakat Jakarta dan luar Jakarta," ujar dia.

Yayat menambahkan sejumlah kasus meluasnya banjir dan genangan air di beberapa lokasi seharusnya dijadikan indikasi adanya ancaman yang lebih besar.

Ia mencontohkan deretan kebijakan yang sudah keluar akibat banjir, seperti ditinggikannya jalan tol menuju Bandara Soekarno-Hatta, pembangunan tanggul di Muara Angke, serta pembangunan tanggul di Cilincing.

Tiga kebijakan itu menunjukkan bahwa wilayah utara Jakarta rawan bencana, dan jika tidak diantisipasi, wilayah itu akan tenggelam.